

03 MAY 2016

Oleh: Pupung Arifin

03 MAY 2016

SEJAK tahun 1993, organisasi dunia Persatuan Bangsa Bangsa melalui UNESCO telah mendeklarasikan Hari Kebebasan Pers Sedunia, yang dirayakan setiap 3 Mei. Tahun ini, perayaan kerja jurnalisisme yang berjalan di koridor demokrasi dilaksanakan di kota Helsinki, Finlandia. Kota ini dipilih agaknya karena berdasarkan data *Reporters Without Borders* tiga tahun terakhir negara di Skandinavia ini tidak pernah bergeser sebagai negara dengan kebebasan pers terbaik sedunia (rsf.org, 2016).

Momen Hari Kebebasan Pers Sedunia juga harus digunakan seluruh masyarakat Indonesia sebagai refleksi atas perjalanan bangsa mengawal tegaknya demokrasi dalam lingkup kerja jurnalisisme. Pada hakekatnya, kebebasan pers bukan hanya dipahami sebagai melindungi pers untuk bebas menyuarakan berbagai hal dengan cara apapun, namun pers juga harus tetap berjalan pada lorong regulasi yang benar. Masyarakat dan perusahaan media juga tidak dapat dilepaskan dari kinerja wartawan yang bebas dan bermartabat. Berdasarkan sejarahnya, pers hidup di antara tiga kuadran, perusahaan, masyarakat dan wartawan.

Tantangan kebebasan pers semakin berat karena era reformasi di Indonesia yang dibarengi pesatnya kemajuan teknologi membuat masyarakat memiliki banyak pilihan media informasi. Masyarakat bukan lagi hanya konsumen media, namun sangat memungkinkan ambil bagian sebagai produsen informasi. Secara sederhana, masyarakat dapat memiliki medianya sendiri tanpa harus bergantung pada pemodal besar. Berdasarkan pernyataan Imam Wahyudi, anggota Dewan Pers dalam Lokakarya Klinik Hukum Media Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dise-

enggarakan bekerjasama dengan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (29/4/2016), masih ada kesenjangan literasi atau pemahaman dalam memahami konteks kemajuan kemerdekaan pers dan perkembangan teknologi. Masyarakat sudah memiliki keleluasaan dan kemudahan memiliki media, sebaliknya para pekerja pemerintah khususnya di daerah masih berpikir dengan cara lama. Beberapa pemerintah daerah ketakutan ketika ditekan jurnalis yang mengatasnamakan media tertentu, namun bila ditelisik lebih lanjut banyak media fiktif dan tidak dijalankan dengan semangat profesionalisme proses jurnalistik.

Media berita fiktif atau *abal-abal* juga menjadi tren baru dalam pemakaian kebebasan pers. Sebagian oknum di masyarakat melihat hal ini merupakan peluang memperoleh kue dana pemerintah atau perusahaan ketika mereka meminta imbalan hasil liputan tentang sebuah lembaga. Sehingga tantangan kebebasan pers saat ini bukan hanya bagaimana kerja jurnalis harus bebas dari tekanan dan ancaman banyak pihak, namun masyarakat juga perlu dilindungi dari kegiatan pers yang kurang bertanggung jawab. Maka posisi masyarakat, perusahaan pers bersama dengan Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers dan tidak seinata-mata melindungi lembaga pers atas nama kemerdekaan berpendapat.

Tren jumlah pengaduan masyarakat kepada Dewan Pers cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Imam Wahyudi menyampaikan, pada tahun 2012 jumlah pengaduan sebanyak 470. Data Dewan Pers 2014 menunjukkan peningkatan dengan total sebanyak 544 aduan (jogja.tribunews.com,



2015). Ia menegaskan bahwa tren peningkatan angka ini disinyalir sebagai andil pemaknaan kebebasan pers yang kurang tepat dari jurnalis atau perusahaan pers tertentu. Oknum yang berliput di balik kebebasan pers cenderung mengurangi atau menyederhanakan proses kerja jurnalistik. Salah satu proses yang dipotong adalah verifikasi informasi, padahal justru proses inilah yang paling penting dalam rangka memberikan informasi yang layak kepada masyarakat. Pengebirian proses verifikasi terkadang sengaja dilakukan bukan karena tidak memiliki waktu, namun karena ada tujuan dari jurnalis *abal-abal* memeras target berita.

Saat ini profesi atau kelompok masyarakat yang paling rentan adalah Kepala Sekolah ataupun Kepala Desa yang diberikan alokasi dana cukup besar dari pemerintah untuk peningkatan kualitas pendidikan dan desa. Mereka adalah kelompok yang disasar orang-orang yang mengaku sebagai jurnalis untuk memperoleh sebagian dana dari APBN. Tren permasalahan yang lain adalah ketika media mengaitkan permasalahan personal seseorang dengan profesinya.

Misalnya bagaimana sebuah portal berita online memberitakan seorang perawat rumah sakit yang melakukan keributan di tempat tinggalnya. Dalam pemberitaan disebutkan dengan jelas dalam judul maupun tubuh berita profesi dan nama rumah sakitnya. Sehingga walaupun keributan tersebut murni permasalahan personal si perawat di luar profesinya, namun pemberitaan itu secara tidak langsung merusak nama baik rumah sakit tempat dia bekerja.

Tuntutan akan kebaruan peristiwa dan pertimbangan sisi menarik sebuah

berita terkadang membuat konten pemberitaan cenderung tidak tuntas. Media hanya memberitakan sebuah peristiwa pada saat awal peristiwa muncul. Bila esoknya ada peristiwa lain yang dianggap lebih menarik dan menjual, media meliput peristiwa lain tersebut. Cara kerja yang demikian membuat pemahaman audiens terhadap sebuah peristiwa tidak komplit. Persepsi masyarakat akan peristiwa hanya berdasarkan fakta sepotong-sepotong dan berpotensi munculnya penghakiman sepihak yang cepat menyebar secara luas dengan bantuan media sosial. Hal ini jelas merugikan subyek liputan karena citra orang tersebut cenderung buruk. Kovach dan Rosenstiel (2001) dalam buku legendarisnya yang berjudul *Elements of Journalism* menyampaikan dalam elemen kedua bahwa loyalitas utama jurnalis adalah kepada kepentingan warga. Maka itikad buruk jurnalis yang sekadar bertujuan menghakimi seseorang atau sebuah lembaga menyalahi profesionalitas jurnalis.

Berdasarkan kondisi tersebut ancaman kebebasan pers bukan hanya bersumber pada tekanan dan kekerasan jurnalis dari perusahaan media maupun masyarakat. Kita harus bersama-sama mengawal kerja jurnalistik atau kerja media gadungan yang berkedok di balik kebebasan pers. Indonesia sebagai negara dengan indeks kebebasan pers peringkat 130 dunia pada tahun 2016 memiliki tugas rumah yang cukup berat memperbaiki peringkat, apalagi tahun 2017 Indonesia akan menjadi tuan rumah peringatan hari Kebebasan Pers Sedunia.

Semoga dengan telah disusunnya buku panduan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) oleh Dewan Pers, masyarakat dapat mengetahui secara riil dan komprehensif kondisi kemerdekaan pers di Indonesia. ***

Pupung Arifin, Dosen
Program Studi Ilmu Komunikasi
FISIP Universitas Atma Jaya
Yogyakarta